



DILEMA PRIORITAS: ANALISIS PERUBAHAN KEBIJAKAN LUAR NEGERI BRAZIL ERA BOLSONARO DALAM ISU LINGKUNGAN GLOBAL

Nurul Husna, Mohamad Rosyidin, S.Sos., M.A, Muhammad Faizal Alfian, S.IP.,
M.A.

Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Diponegoro

Jalan Prof. H. Soedarto, SH., Tembalang, Kota Semarang Website:
<http://www.fisip.undip.ac.id> Email: fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

Changes within Brazil's policy orientation in the environmental sector have been felt since the leadership of President Lula da Silva (2003-2011), then Dilma Rouseff (2011-2016), until the realization of the changes was very tangible during the reign of Jair Bolsonaro (2018-present). Bolsonaro's campaign that said if he is elected he will retrack Brazil's environmental policy away from the Paris Agreement has become a huge controversy in the the world. Not to mention that during his reign, changes in domestic and international environmental policies continued to occur. Starting from the merger of environmental management agencies in the Ministry, reducing the allocation of funds for the environment, expanding commercial land in the Amazon Forest, loosening the law for development on Amazon Forest land, up until the creation of many new development projects which being carried out on Amazon Forest land. Various policy changes and the commercialization of land under Bolsonaro's government caused the amount of deforestation in Brazil to increase every year and Brazil's compliance with the provisions of the Paris Agreement decreased. This study uses Hermann's Theory to analyze the causes of changes in policy orientation that occurred in Brazil under Bolsonaro's government. Based on the research that has been done, it is evident that there are two main factors causing the change in policy orientation which are rooted in the leadership factor (Leader Driven) and the Bureaucratic Advocacy factor (Beraucratic Advocacy) from the Bolsonaro government itself.

Keywords: *Environmental Policy, Bolsonaro, Hermann Theory, Policy Orientation, Land Commercialization*

PENDAHULUAN

Sejak lahirnya Konvensi Internasional dalam Perubahan Iklim dan Keanekaragaman Hayati pada tahun 1992 di Brazil, Brazil sukses menjadi pelopor dalam kebijakan perubahan iklim dan diplomasi lingkungan (Escobar, 2019). Presiden Brazil pada saat itu, Fernando Collor de Mello menjadikan kebijakan terkait lingkungan sebagai prioritas utama. Kondisi tersebut membentuk identitas Brazil sebagai pelopor di bidang lingkungan (Feeney, 1992). Dengan konsumsi terhadap energi terbarukan yang

lebih banyak daripada energi yang lain, serta dengan pengembangan sistem perlindungan lingkungan mulai dari tahun 1980an membuat para ilmuwan di dunia menobatkan Brazil sebagai “*frontrunner*” atau contoh negara yang terkemuka dalam bidang lingkungan (Viscidi, 2019).

Namun, warisan identitas Brazil sebagai negara pelopor di bidang lingkungan tersebut sekarang sedang terancam. Semenjak kampanye, Jair Bolsonaro beberapa kali melontarkan pernyataan untuk menarik Brazil keluar dari *Paris Agreement*. Bahkan, sebelum memulai masa jabatannya, Bolsonaro menarik mundur Brazil dari tawaran PBB untuk menjadi tuan rumah dari Konferensi Perubahan Iklim Persatuan Bangsa-Bangsa 2019, yang pada akhirnya dilaksanakan di Madrid, Spanyol pada tanggal 2-13 Desember 2019 (Escobar, 2019). Kemudian, sejak mulai menjabat pada 1 Januari 2019, Bolsonaro telah membongkar beberapa divisi pemerintah yang didedikasikan untuk perubahan iklim (Escobar, 2019). Dikutip dari Science Magazine, ditemukan fakta yang mengherankan bahwa kabinet Bolsonaro tidak menggunakan data ilmiah ataupun teori yang terdistorsi untuk menjustifikasi keraguan mereka terkait realitas pemanasan global yang disebut-sebut menjadi alasan utama keraguan Bolsonaro untuk memprioritaskan kebijakan lingkungan (Science Magazine, 2021).

Disamping itu, kabinet Bolsonaro membingkai perubahan iklim yang terjadi sebagai bagian dari perang ideologis antara pihak kiri dan pihak kanan, atau antara agenda globalis dan kedaulatan Brazil (Escobar, 2019). Menteri luar negeri Brazil yang baru, Ernesto Araújo, menuliskan bahwa pemanasan global adalah “dogma” sayap kiri, yang digunakan untuk “mencekik pertumbuhan ekonomi kapitalis dari negara-negara demokratis” (Escobar, 2019). Kementerian Araújo juga telah menghilangkan Divisi Perubahan Iklim yang sebenarnya merupakan pelopor utama eksistensi Brazil di dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan forum internasional lainnya. Semua kebijakan lingkungan sekarang berada di bawah satu departemen, dan kata “iklim” telah menghilang dari struktur administrasi kementerian. Dua departemen, yaitu departemen dari Kementerian Lingkungan Hidup yang menangani perubahan iklim dan kebijakan mitigasi juga dibatalkan, bersamaan dengan satu departemen yang dikhususkan untuk memerangi deforestasi di Brazil (Araujo et al, 2020).

Terdapat beberapa penelitian yang dilakukan pada tahun 2019, yang turut membahas tentang kebijakan lingkungan Brazil setelah Bolsonaro menjabat. Fearnside (2019) menyatakan bahwa penyebab dari perubahan kebijakan tersebut adalah faktor personal (idiosinkratisme) dari Bolsonaro sendiri yang berpengaruh terhadap agenda kabinetnya. Velho (2019) dalam penelitiannya yang memuat paparan terkait kebijakan lingkungan di Hutan Amazon pada masa pemerintahan Jair Bolsonaro. Velho dalam penelitiannya mengusulkan pendekatan tiga langkah. Pertama, penjabaran terkait kebakaran hutan yang baru-baru ini terjadi di Amazon dan langkah-langkah pemerintah untuk memberantasnya; Kedua, peran suku-suku asli dalam pemeliharaan hutan dan dampak perubahan peraturan lingkungan terhadap pengertian wilayah kelompok tersebut. Terakhir, analisis peran entitas internasional dalam pelestarian hutan dan proses integrasi.

Dengan demikian, penulis menyimpulkan bahwa kebanyakan dari penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, kebanyakan penulis hanya membahas terkait fenomena-fenomena yang mengindikasikan kecenderungan Bolsonaro untuk tidak lagi memprioritaskan kebijakan lingkungan selama pemerintahannya di Brazil. Memang hanya terdapat sedikit analisis terkait faktor yang menyebabkan sikap Bolsonaro tersebut, misalnya faktor idiosinkratisme, atau faktor orientasi pemerintah

(kabinet), namun masih belum ada penelitian yang dapat menelaah motif utama dari perubahan kebijakan oleh Bolsonaro tersebut. Selain itu, belum ada penelitian yang menjelaskan terkait ketidakkonsistenan sikap Bolsonaro terkait beberapa pernyataan yang dilontarkannya dan kebijakan yang diambilnya. Sikap tersebut sangat manipulatif, dan mendorong berbagai kecurigaan atas motif utama dari perubahan kebijakan yang ditetapkan oleh Bolsonaro tersebut. Maka dari itu, penulis akan mengulas lebih dalam untuk menemukan alasan atas manipulasi sikap Bolsonaro, dan motif utama dari upaya penarikan Brazil terhadap *Paris Agreement* di bawah pemerintahan Bolsonaro ini.

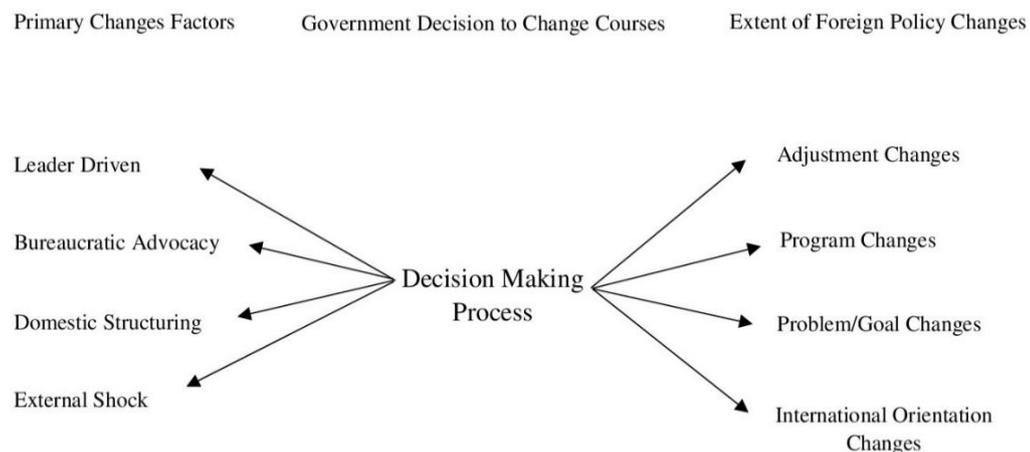
KERANGKA TEORI

Perubahan Kebijakan Luar Negeri (*Foreign Policy Change*) merupakan bagian dari kajian Analisis Kebijakan Luar Negeri (*Foreign Policy Analysis*) yang menekankan kepada berbagai teknik, perspektif teoritis, pendekatan integratif, tingkat analisis bertingkat dan eksplanasi mengenai berbagai penyebab terjadinya keanekaragaman dalam kebijakan luar negeri. Salah satu basis konseptual dari studi Perubahan Kebijakan Luar Negeri ini dikembangkan oleh Rosenau pada tahun 1970-an. Rosenau menyusun kerangka studi kebijakan luar negeri yang disebut *Linkage Theory* (Rosenau, 1971). Konsep *Linkage Theory* ini mengaitkan antara dua sistem, yakni sistem nasional dan sistem internasional dalam suatu negara. Menurut James N. Rosenau, kebijakan luar negeri digunakan untuk menganalisa dan mengevaluasi kekuatan-kekuatan internal dan eksternal yang mempengaruhi kebijakan luar negeri suatu negara terhadap negara lain. Oleh karenanya untuk menganalisis bagaimanakah pertautan antara kedua faktor politik ini, dapat digunakan *teori linkage* yang dikemukakan James N. Rosenau. Di samping faktor politik domestik dan eksternal internasional tersebut, menurut Rosenau, terdapat pula variabel individu decision-maker seperti Kepala Negaraal Pemerintahan, khususnya mengenai image, persepsi, dan karakteristik pribadinya yang menentukan corak politik luar negerinya.

Terdapat banyak teori perubahan kebijakan luar negeri yang dapat digunakan untuk menjelaskan fenomena perubahan kebijakan lingkungan Bolsonaro, namun dalam penelitian kali ini penulis akan menggunakan Teori Perubahan Kebijakan Luar Negeri Hermann untuk menganalisis rumusan masalah terkait perubahan orientasi kebijakan Brasil dari Lingkungan ke Pembangunan Ekonomi pada era pemerintahan Presiden Jair Bolsonaro. Hermann mengklasifikasikan empat tingkat perubahan kebijakan luar negeri yang menyertakan sejumlah indikator di dalamnya (Hermann, 1990): Pertama, ***Adjustment Changes***, perubahan terjadi di tingkat usaha (besar atau kecil) dan atau dalam skope penerimaan (seperti penyaringan dalam sasaran). Apa yang dilaksanakan, bagaimana dilaksanakan dan tujuan kebijakan luar negeri yang dilaksanakan masih belum berubah. Kedua, ***Program Changes***, perubahan dilakukan dalam metode atau caracara bagaimana tujuan dan masalah itu ditangani. Berbeda dengan *adjustment changes* yang sifatnya kuantitatif, *program changes* bersifat kualitatif dan melibatkan instrumen baru negara seperti melalui negosiasi diplomatik bukan kekuatan militer. Apa yang dilaksanakan dan bagaimana dilaksanakan mengalami perubahan namun tujuan dari kebijakan luar negeri tidak berubah. Ketiga, ***Problem/Goal Changes***, masalah atau tujuan awal yang ditangani digantikan atau diubah. Dalam perubahan kebijakan luar negeri ini, tujuannya diganti. Keempat, ***International Orientation Changes***, perubahan kebijakan luar negeri paling ekstrem melibatkan perubahan arah seluruh orientasi aktor terhadap masalah dunia. Dibandingkan perubahan sebelumnya yang sifatnya kecil

terhadap satu isu atau aktor tertentu, perubahan orientasi melibatkan perubahan mendasar peran dan aktivitas internasional. Tidak hanya satu kebijakan tetapi banyak perubahan yang simultan.

Gambar 1.1
Bagan Ide Pokok Teori Hermann



Sumber: Hermann, 1990

Hermann secara spesifik menyebut pemicu terjadinya perubahan yang juga memasukkan unsur domestik dan internasional dalam empat faktor (Hermann, 1990): Pertama, **Leader driven**, kondisi ini biasanya terjadi di negara otoriter dimana pemimpin pemerintahannya sering memaksakan kehendaknya dalam arah dasar kebijakan luar negeri. Kedua, **Bureaucratic Advocacy**, perubahan bisa saja terjadi dari sekelompok orang di dalam pemerintahan yang mengarahkan kebijakan luar negeri. Kelompok ini bisa saja berada di dalam sebuah lembaga atau menyebar di sejumlah institusi namun mereka berinteraksi secara berkala. Ketiga, **Domestic restructuring**, istilah ini merujuk kepada segmen masyarakat yang relevan yang mendukung sebuah rejim yang memerintah dan mungkin pula segmen masyarakat ini menjadi agen perubahan. Keempat, **External shock**, pemicu ini merujuk kepada sumber perubahan kebijakan luar negeri dari peristiwa internasional yang dramatis. Sebagian dari perubahan kebijakan luar negeri hasil dari persepsi pemimpin pemerintahan terhadap beberapa perubahan di lingkungan eksternal.

Ketiga, teori Hermann. Salah satu unsur penting dalam model perubahan kebijakan luar negeri yang diajukan Hermann (1990) adalah adanya tujuh tahapan dalam perubahan kebijakan luar negeri (Hermann, 1990). Pertama, **Initial policy expectations**, perubahan yang terjadi dalam kebijakan luar negeri memasukkan ekspektasi unsur para pengambil kebijakan berkaitan dengan pengaruh yang diakibatkan oleh sebuah kebijakan baru. Kedua, **External actor/environmental stimuli**, perubahan kebijakan pada umumnya muncul dari perubahan lingkungan yang tidak diharapkan yang memberikan rangsangan baru kepada kebijakan yang ada. Ketiga, **Recognition of discrepant information**, rangsangan eksternal ini merupakan sinyal yang secara

potensial menjadi umpan balik kepada pengambil kebijakan. Keempat, *Postulation of a connection between problem and policy*, jika sebuah kebijakan akan berubah langkah kritisnya adalah identifikasi hubungan sebab akibat antara masalah dan kebijakan yang ada. Kelima, *Development of alternatives*, jika pengambil kebijakan tidak dapat menemukan cara untuk mengurangi masalah maka kebijakan baru akan ditempuh. Keenam, *Building authoritative consensus for choice*, konsensus dalam kebijakan luar negeri melibatkan lebih dari satu pengambil kebijakan.

Selain itu, melihat dari sisi keberpengaruhan kebijakan domestik Brasil terhadap kebijakan luar negerinya terkait isu kebijakan lingkungan ini maka konsep *Linkage Theory* dari James N. Rosenau turut berlaku, dimana menurut Rosenau, terdapat lima sumber utama yang menjadi input dalam perumusan kebijakan luar negeri suatu negara (Rosenau, 1969). Kelima sumber tersebut antara lain: (1) Sumber idiosinkretik, merupakan sumber internal yang melihat nilai-nilai pengalaman, bakat serta kepribadian elit politik yang mempengaruhi persepsi, kalkulasi, dan perilaku mereka terhadap kebijakan luar negeri di negara yang mereka pimpin; (2) Sumber sistemik, yaitu sumber yang berasal dari lingkungan eksternal seperti hubungan antar negara, aliansi, dan isu-isu area; (3) Sumber masyarakat, merupakan sumber yang berasal dari lingkungan internal suatu negara seperti dari budaya, sejarah, ekonomi, struktur sosial, dan opini publik; (4) Sumber pemerintahan/birokrasi, merupakan sumber internal yang menjelaskan tentang pertanggungjawaban politik dan struktur dalam pemerintahan; dan (5) Sumber peran, merupakan sumber yang berasal dari peran berdasarkan posisi dalam pemerintahan itu sendiri (Rosenau, 1969). Dari kelima sumber ini, maka Menurut James N. Rosenau, kebijakan luar negeri dapat digunakan untuk menganalisa dan mengevaluasi kekuatan-kekuatan internal dan eksternal yang mempengaruhi kebijakan luar negeri suatu negara terhadap negara lain. Pada kasus perubahan kebijakan luar negeri lingkungan Brasil dapat dilihat bahwa kecenderungan perubahan orientasi dari lingkungan ke ekonomi tidak terjadi serta merta sekaligus dalam satu masa pemerintahan, namun bertahap mulai dari pemerintahan Collor de Mello yang sangat mengagungkan kebijakan lingkungan, kemudian sedikit demi sedikit terjadi perubahan dalam beberapa masa pemerintahan Presiden setelahnya, yaitu Lula da Silva dan Dilma Rousseff, hingga secara terang-terangan berubah arah orientasi pada masa pemerintahan Jair Bolsonaro. Tentu semua perubahan ini ada dengan turut adanya pengaruh dari berbagai sumber kebijakan luar negeri yang telah dipaparkan Rosenau tersebut, diantaranya misal: Sumber idiosinkratik (kepribadian Bolsonaro), sumber pemerintahan/birokrasi (parlemen di bawah Bolsonaro) dan sumber peran pemerintahan itu sendiri (peran Bolsonaro).

Terakhir, pembahasan pada skripsi ini juga akan menerangkan alasan dari sudut pandang kapabilitas lingkungan dan sumber daya alam untuk menciptakan kemampuan dan kekuatan ekonomi di masyarakat. Dengan menggunakan paham *Natural Capitalism* yang dikemukakan oleh Amory Lovins, dapat dipahami alasan mengapa kemudian Brasil di bawah pemerintahan Jair Bolsonaro dan beberapa pimpinan sebelumnya begitu ambisius untuk memberdayakan Hutan Amazon sebagai aset utama perekonomian yang paling menguntungkan. *Natural Capitalism* merupakan sebuah sistem paham yang terdiri dari empat prinsip yang saling berhubungan, dimana dalam hal ini, empat prinsip tersebut berkaitan dengan kepentingan bisnis dan lingkungan yang saling tumpang tindih, dan dimana bisnis dapat memuaskan kebutuhan pelanggannya dengan lebih baik, meningkatkan keuntungan, dan membantu menyelesaikan masalah lingkungan pada saat yang bersamaan (Amory B. Lovins, 2007). Adapun kaitan dari paham ini terhadap

kajian skripsi tentang perubahan orientasi kebijakan Brasil ini adalah, paham ini akan menguak analisis-analisis terkait faktor-faktor yang menyebabkan perubahan orientasi tersebut terjadi. Paham ini dapat menjelaskan dan memberikan gambaran secara umum terkait alasan mengapa Hutan Amazon bisa menjadi *'Golden Way'* bagi Presiden Bolsonaro maupun Kabinetnya untuk membelokkan orientasi kebijakan demi suatu motif ekonomi. Selain itu, paham ini juga dapat menjelaskan mengapa dampak dari perubahan agenda skala prioritas pemerintahan dari lingkungan ke ekonomi dapat menimbulkan dampak yang begitu signifikan terhadap ekonomi itu sendiri di akhir masa.

PEMBAHASAN

Info-Info Dasar Politik Brasil (Masa Lula, Dilma hingga Bolsonaro)

Di bawah kepemimpinan Fernando Collor de Mello, pada bulan Juni tahun 1992 Brasil menjadi tuan rumah Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) PBB tentang Lingkungan dan Pembangunan (Feeney, 2014). Konferensi ini dilaksanakan di kota Rio de Janeiro, dan menurut Fernando, momen ketika Brasil dapat menjadi tuan rumah KTT tersebut akan menjadikan Brasil negara yang menduduki posisi bergengsi di kancah internasional, utamanya dalam bidang administrasi lingkungan. Selama masa Pemerintahannya, Collor telah menempatkan prioritas terhadap lingkungan yang tinggi dalam agenda politik Brasil (Escobar, 2019). Agenda politik ini secara umum diterima oleh pemerintah Brasil yang sesungguhnya masih kurang menyadari potensi Amazon sebagai sumber kekayaan alam untuk mendukung pengembangan perekonomian. Dari gambaran ini dapat dengan jelas terlihat bahwa orientasi kebijakan lingkungan merupakan orientasi utama yang diniatkan menjadi identitas Brazil sebagai suatu negara di kancah internasional.

Dengan berbekalkan *image* sebagai *Frontrunner Country* dalam bidang lingkungan tersebut, maka sontak mata dunia tertuju pada Brasil khususnya dalam bidang lingkungan (Britannica, 2022). Melihat situasi ini, Presiden Brasil Collor de Mello tidak tinggal diam dan secara langsung mengambil keputusan untuk menjadikan agenda lingkungan menjadi agenda utama dalam skala prioritas politik Brasil di masa pemerintahannya (Feeney, 2014). Namun sangat disayangkan, dengan agenda politik yang sudah bagus dan rampung, Fernando melupakan dua hal utama yang seharusnya menjadi pertimbangan krusial terhadap berjalannya prioritas agenda politik yang dibuat oleh Fernando tersebut di masa mendatang. Dalam hal ini, Fernando lupa untuk memperhitungkan kapasitas dan ketahanan ekonomi Brasil yang pada saat itu masih memiliki hutang luar negeri yang mencapai sekitar US\$ 121 miliar dan pada saat itu juga Brasil masih berpredikat sebagai salah satu peminjam terbesar Bank Dunia dimana pada akhir tahun 1990 pinjaman Brasil hampir mencapai 10% dari akumulasi pinjaman seluruh negara di Bank Dunia (Feeney, 2014). Selain itu, Fernando juga kurang menyadari bahwa agenda politiknya sangat membutuhkan dukungan dari banyak pihak yang memiliki wewenang spesifik dan kuat dalam hal lingkungan, Collor tidak memiliki basis politik yang kuat di Kongres dan harus mencari dukungan dari kelompok politik lainnya, dan sayangnya Fernando tidak memiliki banyak *stakeholders* yang dapat mendukung dan bekerjasama dengannya dalam proyek-proyek lingkungannya tersebut (Feeney, 2014).

Kemudian lanjut pada masa pemerintahan Lula da Silva, di masa pemerintahannya Lula dirasa memiliki sistem superpresidensial yang sangat kuat dalam memerintah, hal ini dibuktikan dengan cabang-cabang pemerintahan lain dirasa relatif

lemah dan memiliki mekanisme kontrol yang sangat minim ketika Lula memerintah (Mainwaring, 1993). Dalam kaitannya dengan kebijakan lingkungan, Lula bekerjasama dengan Menteri Lingkungan Hidupnya yang bernama Marina Silva dari *Working Party*. Seiring berjalannya waktu, kebijakan-kebijakan yang diinisiasi dan dijalankan oleh Marina Silva berjalan dengan sukses, namun ada suatu waktu Marina Silva memutuskan untuk mengundurkan diri pada tahun 2008 dari jabatannya tersebut karena bersitegang dengan Lula, dimana Lula bersikeras untuk menjalankan proyek yang menurut Marina Silva sangat bertolak belakang dengan pertimbangan lingkungan yang seharusnya dimiliki negara dengan prioritas lingkungan sebesar Brasil (Hochstetler K. a., 2007).

Terakhir, sebelum memasuki masa pemerintahan Jair Bolsonaro yang akan secara terang-terangan menyuarakan penyimpangan orientasi lingkungan, pada masa pemerintahan Dilma Roussef jarak antara pemerintah dan masyarakat sangat amat jelas terasa. Pemerintahan Dilma Roussef dianggap sangat teknokratis dan apolitis dimana dalam banyak kesempatan kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh Dilma dianggap sangat memihak pada kepentingan elit Hochstetler K. a., 2013). Koneservasi alam yang dilakukan pada masa pemerintahan Dilma Roussef dianggap sangat minim dan justru malah pembangunan yang semakin marak digalakkan. Oleh karena itu banyak orang berpendapat bahwa masa pemerintahan Dilma Roussef ini adalah masa dimana *neodevelopmentalist* di Brasil berkembang amat pesat.

Penarikan Diri Dari Tuan Rumah *Climate Change Conference 2019*

Dikarenakan Brasil merupakan salah satu anggota dari *United Nations Climate Change Conference* (UNFCCC), maka dalam hal ini Brasil memiliki kewajiban untuk meratifikasi esensi dari *Paris Agreement*. Ada tiga poin utama yang harus dipenuhi oleh negara-negara yang menyepakati *Paris Agreement*, yaitu:

- 1) Secara substansial mengurangi emisi gas rumah kaca;
- 2) Meninjau komitmen nasional negara setiap lima tahun;
- 3) Menyediakan anggaran bagi negara-negara berkembang untuk memitigasi perubahan iklim, membangun ketahanan dan meningkatkan kapasitas negara untuk beradaptasi dengan dampak iklim (Delbeke, 2019)

Menilik dari sisi historis, memang sebelum meratifikasi *Paris Agreement*, Brasil telah memiliki sejumlah masalah lingkungan. Hal ini dibuktikan dengan beberapa predikat yang disandang Brasil, seperti menjadi salah satu negara penghasil gas rumah kaca terbesar di Amerika Latin pada tahun 2015, dimana Brasil menjadi penghasil karbon dioksida terbesar keenam di dunia dengan mengeluarkan 1,927 miliar ton karbon dioksida dan menyumbang 3,5% dari total emisi dunia. Pertumbuhan ekonomi yang cepat telah meningkatkan penggunaan bahan bakar fosil dan meningkatkan emisi gas rumah kaca Brasil.

Selain itu, kerusakan lingkungan juga terjadi di Brasil akibat deforestasi yang berdampak pada lingkungan di kawasan hutan Amazon. Amazon merupakan hutan terbesar di dunia, dan 49% dari luas daratan Amazon ada di Brasil. Sekitar 2.000 km persegi hutan di Brasil telah ditebangi karena penebangan liar dan kebakaran. Deforestasi di Brasil terutama didorong oleh aktivitas pertanian, namun pembangunan jalan, bendungan, aktivitas pertambangan, dan urbanisasi juga berkontribusi signifikan terhadap deforestasi (Endarwati, 2018).

Bolsonaro Sebagai Malapetaka Bagi Lingkungan: Utopia Kebijakan Lingkungan

Agenda anti-lingkungan Bolsonaro tidak pernah menjadi rahasia semenjak awal ia menjabat sebagai Presiden empat tahun yang lalu. Selama masa kampanye, Bolsonaro bahkan berjanji bahwa ia tidak akan mengakui Tanah Adat selama masa jabatannya, dan selalu mengemukakan niatnya untuk mengkomersialkan lahan Amazon (Gonzaga, 2022). Mulai dari peningkatan deforestasi yang teramat mengejutkan hingga persetujuan penggunaan lebih dari seribu pestisida baru, berikut adalah beberapa dampak pemerintahan Bolsonaro terhadap lingkungan.

Selama Bolsonaro menjabat, telah terjadi peningkatan deforestasi di hutan Amazon sebanyak 52,9%, dibandingkan dengan tiga tahun sebelumnya. Hal ini telah sukses mengejutkan dunia dan menyebabkan kegemparan. Namun, bukan hanya Amazon yang menderita. Bioma lain di negara ini seperti Cerrado dan Pantanal juga sedang didorong untuk membuka jalan bagi perkebunan kedelai dan peternakan sapi (Gonzaga, 2022). Pantanal, lahan basah unik yang menjadi rumah bagi jaguar dan spesies terancam punah dan kehilangan sepertiga dari seluruh lahannya pada tahun 2020 karena kombinasi kekeringan parah dan kebakaran hutan yang disengajakan oleh para petani untuk memperluas lahan bisnis mereka (Gonzaga, 2022). Gambar 1 berikut akan menunjukkan peningkatan kebakaran hutan dari tahun ke tahun di Brazil.

Gambar 3.1
Perbandingan Tingkat Kebakaran Hutan di Brasil 2017/2018 dan 2019/2020



© INPE

Sumber: INPE, 2021

Deforestasi di seluruh Brasil bukan hanya ancaman bagi negara. Brasil telah meningkatkan emisi gas rumah kaca sebesar 10% karena deforestasi yang terjadi di negara ini. Menurut sebuah analisis oleh Carbon Brief, Brasil adalah penghasil emisi tertinggi ke-5 di dunia, sebagian besar karena penggunaan lahan dan kehutanannya. Hutan sangat penting dalam memerangi krisis iklim. Kehilangan ekosistem vital ini berarti juga menghilangkan lebih banyak karbon di atmosfer dan lebih sedikit sumber daya untuk menangkap emisi gas di udara.

Dari semua kerusakan dan deforestasi yang terjadi sebagai dampak dari proyek-proyek, program-program, serta perizinan yang dibuat oleh Bolsonaro, liciknya Bolsonaro tetap membual dihadapan masyarakat bahwa semua hal yang ia lakukan adalah untuk kepentingan pembangunan Brasil dan tidak mengindahkan protes dari

masyarakat daerah yang terdampak secara lingkungan akibat program pembangunan yang ia inisiasikan. Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (*Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD)), membatalkan diskusi tentang peningkatan status Brasil di komite lingkungan pada organisasi tersebut karena kebijakan Presiden Bolsonaro, yang secara negatif mempengaruhi ambisi Brasil untuk bergabung dengan organisasi tersebut sebagai anggota tetap (Human Rights Watch, 2021). Lebih lanjut, Pada April 2021, Presiden Bolsonaro berjanji bahwa Brasil akan mencapai netralitas iklim pada tahun 2050, bukan tahun 2060, yang merupakan peningkatan target dari rencana yang telah ditetapkan pada tahun 2020 (Human Rights Watch, 2020). Tetapi komitmen tersebut belum diformalisasikan dalam undang-undang atau kebijakan, dan perkiraan terbaru menunjukkan bahwa emisi Brasil telah meningkat tajam, bertentangan dengan tujuan yang dijanjikan oleh Bolsonaro.

Sikap Politik Bolsonaro tersebut terkesan sungguh manipulatif, dimana dalam berbagai kesempatan ia masih berusaha mati-matian untuk menjaga “*image*” negaranya, namun di sisi lain pembangunan yang ia lakukan pada faktanya justru menimbulkan kerusakan serta respon negatif baik secara domestik maupun mancanegara.

Bolsonaro Sebagai Pemimpin Yang “*Unethical*”: *The Project of Death*

Presiden Brasil Jair Bolsonaro telah mengeluarkan dua dekrit untuk mendorong pencarian emas dengan fokus pada hutan hujan Amazon. Salah satu dekrit tersebut membentuk komisi multi-lembaga yang bertugas mengembangkan kebijakan untuk mendorong apa yang disebutnya “penambangan rakyat”, dan yang dikatakan akan berkelanjutan (Biller, 2022). Program untuk mendukung pengembangan pertambangan rakyat dan Skala Kecil yang dibuat oleh satu keputusan bertujuan untuk memperkuat kebijakan dan merangsang praktik terbaik. Selain dari mengubah undang-undang dan peraturan yang ada terkait lingkungan, misalnya mengharuskan regulator pertambangan nasional untuk menetapkan kriteria yang disederhanakan untuk analisis permintaan izin untuk pencarian prospek, Bolsonaro juga akan berupaya untuk menjadikan hutan Amazon menjadi wilayah prioritas untuk pengembangan pekerjaan (Biller, 2022). Tindakan Bolsonaro ini memicu kemarahan dari kelompok lingkungan dan masyarakat adat, yang kemudian membuat masyarakat tersadar bahwa kegiatan pertambangan tersebut hanya akan menambah aktivitas perusakan ilegal hutan hujan tropis terbesar di dunia dan mencemarkan saluran airnya dengan merkuri, yang digunakan untuk memisahkan emas.

Menurut Larissa Rodrigues, Manajer portofolio untuk lembaga pemikir lingkungan *Choices Institute*, Tindakan-tindakan politik yang dilakukan oleh Bolsonaro bersama kabinetnya sudah terlalu jauh bertentangan dengan apa yang seharusnya dilakukan pemerintah federal (Biller, 2022). Bolsonaro pun sendirinya telah menyuarakan dukungannya dalam pertambangan Amazon semenjak kampanye kepresidenannya pada tahun 2018, dimana ia berjanji untuk menggali kekayaan mineral hutan hujan yang luas (Biller, 2022). Dengan melakukan hal ini, ia kemudian mendapatkan banyak dukungan dari para penambang.

Organisasi non-pemerintah telah mengeluarkan peringatan tentang bagaimana sikap presiden dan berkurangnya pengawasan lingkungan selama masa jabatannya dimana situasi tersebut menyebabkan maraknya aktivitas pertambangan ilegal dan memacu demam emas serta mendatangkan kerusakan besar di Kawasan Hutan Amazon (Biller, 2022). Namun menurut Bolsonaro, tindakannya bersama kabinet tersebut justru menjadi sebuah alternatif untuk memberikan peluang pekerjaan bagi masyarakat miskin

yang berada di sekitar wilayah pertambangan (Biller, 2022). Sekretaris Jenderal Kepresidenan mengatakan bahwa aktivitas pertambangan yang didukung tersebut akan menjadi prospeksi dan potensi yang tinggi untuk menghasilkan kekayaan dan pendapatan bagi populasi ratusan ribu orang (Biller, 2022).

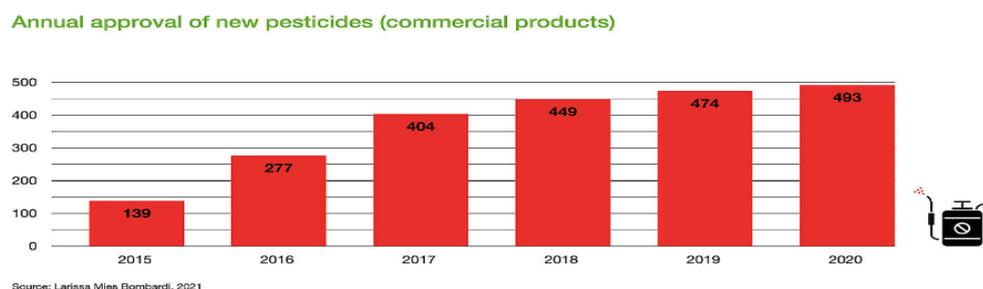
Namun, *Associated Press Investigation* Brasil pada awal tahun 2022 mendapati suatu temuan bahwa jalur pendaratan dan pesawat terbang ilegal telah membantu para pencari emas melakukan berton-ton emas yang ditambang di tanah Pribumi. Emas berakhir di tangan pialang, beberapa di antaranya sedang diselidiki oleh pihak berwenang karena menerima emas dari penambangan ilegal. Emas kemudian dimurnikan di Sao Paulo sebelum menjadi bagian dari rantai pasokan global (Biller, 2022). *Rodrigues' Choices Institute* merilis sebuah studi yang menemukan 229 ton emas dengan indikasi ilegal dijual dari 2015 hingga 2020, atau kira-kira setengah dari produksi nasional yang sebagian besar berasal dari Amazon. Studi ini didasarkan pada analisis lebih dari 40.000 catatan penjualan dan citra satelit dari lokasi produksi. Rodrigues menambahkan bahwa penyederhanaan proses izin regulator pertambangan dapat menghantarkan gelombang permintaan baru atau penghapusan *backlog* permintaan badan tersebut, yang menyebabkan "kurangnya kontrol" (Biller, 2022).

Perizinan Yang Diberikan Bolsonaro Terhadap Jenis Pestisida Baru Untuk Memasuki Brasil

Sekitar 1.500 pestisida baru telah disetujui sejak Bolsonaro untuk masuk dan dipergunakan di Brasil. Banyak pestisida yang diizinkan dan digunakan di Brasil mengandung bahan aktif yang tidak diizinkan di Uni Eropa dan berbahaya bagi kesehatan manusia serta lingkungan. Misalnya, herbisida atrazine, yang telah dilarang di Uni Eropa selama lebih dari 15 tahun karena efeknya yang berbahaya terhadap air tanah, masih dapat ditemukan di lebih dari 70 produk komersial di Brasil (Gonzaga, 2022). Pada gambar 3 dapat terlihat peningkatan penerimaan pestisida di Brasil.

Gambar 3.3

Grafik Peningkatan Penerimaan Pestisida di Brasil pada Masa Pemerintahan Bolsonaro



Sources: Larissa Miles Bombardi

Brasil sebagai salah satu negara yang mengekspor jutaan ton makanan ke dunia meningkatkan jumlah pestisida yang digunakan pada tanamannya setiap tahun (Maciel, 2022). Dalam beberapa bulan terakhir Brasil yang juga merupakan salah satu pilar utama pertanian dunia, mengeluarkan undang-undang yang memfasilitasi persetujuan penggunaan pestisida pada tanamannya sebuah kebijakan yang telah diperpanjang selama pemerintahan Presiden Jair Bolsonaro saat ini. Kebijakan ini telah menimbulkan kritik, terlebih lagi karena telah melipatgandakan peningkatan jumlah pestisida selama

beberapa tahun terakhir, namun hanya berkontribusi pada peningkatan 10% dalam jumlah panen.

Semenjak tahun 2019, ketika Bolsonaro menjabat, 1.411 produk pestisida telah disetujui. Di Brasil, sekarang ada 3.477 pestisida di pasaran yang berarti 40% dari semua produk yang dijual di negara tersebut disetujui selama tiga tahun pemerintahan Bolsonaro (Maciel, 2022). Menurut Uearthed, Brasil adalah tujuan pengiriman oleh hampir setengah dari pestisida yang diklasifikasikan sebagai "sangat berbahaya", yang disebut HHPs (*Highly Hazardous Pesticides*). Pada tahun 2018, penjualan pestisida jenis ini menghasilkan pendapatan sekitar US\$4,8 miliar untuk lima perusahaan terbesar di sektor ini yaitu diantaranya: BASF, Bayer, Corteva, FMC, dan Syngenta (Dowler, 2021). Lebih dari dua pertiga penjualan dilakukan ke negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah dengan Brasil sebagai pasar utama.

Organisasi Kesehatan Dunia atau *World Health Organization (WHO)* dan Organisasi Pangan dan Pertanian atau *Food And Agricultural Organization (FAO)* mendefinisikan HHPs sebagai "pestisida yang diketahui menimbulkan risiko akut atau kronis terhadap kesehatan atau lingkungan menurut sistem klasifikasi yang diterima secara internasional" (Maciel, 2022). Sebuah laporan peneliti Jerman berjudul *Pestizidatlas 2022* yang dirilis awal tahun ini, menunjukkan bahwa sejak tahun 1990 penggunaan pestisida di dunia meningkat hingga 80% (Pestizidatlas, 2022). Para ahli menunjukkan bahwa negara berkembang seperti Brasil memiliki undang-undang yang lebih fleksibel, memungkinkan penggunaan pestisida dengan zat yang dianggap sangat beracun dan oleh karena itu dilarang di Uni Eropa (UE).

Pada Februari 2022, Brasil menyetujui RUU untuk membuat perdagangan pestisida di negara itu lebih fleksibel. Saat ini, proses pendaftaran pestisida di Brasil dilakukan oleh tiga organisasi yaitu Badan Pengawasan Kesehatan Nasional atau *Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA)*, Institut Lingkungan dan Sumber Daya Alam Terbarukan Brasil atau *Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis (IBAMA)*, dan Kementerian Pertanian. Pejabat terkait dengan pertanian berpendapat bahwa karena kurangnya mempertahankan analisis catatan produk oleh tiga organisasi ini, penilaian dapat tetap tidak berubah hingga delapan tahun. Dengan prosesnya yang dianggap kontroversial, telah dianalisis selama lebih dari 20 tahun dan sekarang berupaya mengurangi tahap persetujuan dengan hanya Kementerian Pertanian yang memiliki keputusan akhir untuk pelepasan produk. Hal ini dikritik oleh para pemerhati lingkungan yang menyebutnya sebagai "Hukum Racun". Demi keuntungan secara finansial, Presiden ini bahkan merelakan zat terlarang untuk masuk ke negaranya. Tanpa memperdulikan dampak yang akan ditimbulkan dan protes masyarakat sedikitpun, ia tetap melaju dengan keputusan dan inisiatif egoisnya dalam hal ini.

Rancangan Undang-Undang (RUU) Pelonggaran Proyek Industri Berskala Kecil

Kongres Brasil pada masa pemerintahan Jair Bolsonaro mendapat kecaman dari para pemerhati lingkungan se usai Kongres tersebut menyetujui Undang-Undang baru untuk melonggarkan peraturan lingkungan di sektor pertanian dan energi. RUU Pelonggaran Peraturan tersebut disahkan pada hari Kamis malam, pada tanggal 13 Mei 2021 dengan suara 300 berbanding 122. RUU tersebut membebaskan 13 jenis proyek dari persyaratan untuk mengajukan izin lingkungan untuk suatu proyek pembangunan infrastruktur (DW, 2021).

Para aktivis lingkungan Brasil mengkritik Rancangan Undang-Undang pertanian

dan energi ini karena dianggap melucuti peraturan lingkungan (DW, 2018). Menurut para aktivis dan masyarakat, Undang-Undang tersebut melengkapi daftar hitam pemerintah Jair Bolsonaro yang bertujuan untuk mengkomersialkan hutan Amazon. Pemerintah kemudian juga akan diberi wewenang untuk mengeluarkan jenis izin baru untuk pembangunan jalan dan jaringan listrik, dengan tunduk pada pernyataan tertulis tentang kepatuhan terhadap peraturan lingkungan. Menurut amandemen, persetujuan pembangunan infrastruktur akan diberikan secara otomatis jika perusahaan/*developer* memenuhi beberapa kriteria. Dalam izin pembangunan jalan, Presiden Jair Bolsonaro ingin memulihkan jaringan jalan milik militer yang sudah lama tidak digunakan di hutan Amazon (DW, 2018).

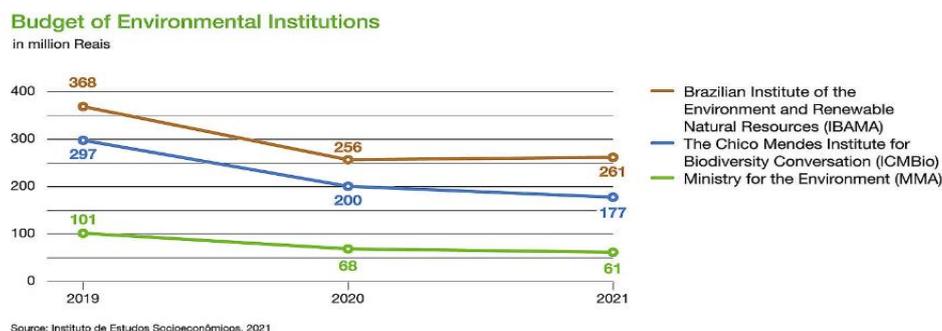
Pemerintahan Presiden Bolsonaro di Brasil ditandai dengan peningkatan deforestasi dan konflik lingkungan. Kerusakan hutan Amazon meningkat sebesar 9,5 persen dalam periode Agustus 2019-2020. Sejak awal masa pemerintahannya, Bolsonaro menargetkan hutan lindung atau kawasan serupa, akan direncanakan untuk dibuka sebagai lahan industri dan perkebunan. Banyak lembaga lingkungan yang mempertimbangkan keanggotaan Brasil dalam Organisasi Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) dengan mengirimkan surat terbuka kepada organisasi tersebut. Hal ini dikarenakan menurut mereka, kebijakan-kebijakan Bolsonaro yang berkaitan dengan lingkungan jika diteruskan akan menyebabkan degradasi lingkungan dan polusi berganda, peningkatan deforestasi di Amazon, dan penyebaran bencana lingkungan baru (DW, 2018).

Pelemahan Fungsi-Fungsi Lembaga Lingkungan

Hal yang paling signifikan dan memegang peran besar untuk melemahkan badan-badan pemerintah yang bertanggung jawab untuk memantau lingkungan dan menegakkan hukum perlindungan hutan adalah kebijakan terkait pengurangan alokasi dana dalam masa kepemimpinan Bolsonaro sendiri. IBAMA (*Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis*) atau Institut Lingkungan dan Alam Sumber Daya Terbarukan, merupakan lembaga penting yang bertanggung jawab atas kebijakan lingkungan di Brasil, mendapat pemotongan dana sebesar 30% dari 2019 hingga 2020, sementara anggaran untuk *Institut Chico Mendes* untuk Konservasi Keanekaragaman Hayati berkurang sebesar 32,7 persen selama periode yang sama. Pada tahun 2021, anggaran keseluruhan Departemen Lingkungan berada pada level terendah sejak 2010 (Gonzaga, 2022). Pada gambar 4 berikut dijelaskan terkait penurunan alokasi dana untuk Departemen Lingkungan Brasil.

Gambar 3.4

Alokasi Pendanaan Pemerintah untuk Institusi Lingkungan Brasil



Source: Instituto de Estudos Socioeconomicos, 2021

Kurangnya sumber daya, bersama dengan pemecatan karyawan dari pekerjaan mereka ada pengurangan 10% dalam staf terkait lingkungan selama pemerintahan Bolsonaro telah memungkinkan perusak hutan untuk memperluas bisnis mereka. Tanpa sumber daya, lembaga lingkungan tidak memiliki *bandwidth* untuk melacak kejahatan lingkungan dan menindaknya

Pembelaan Kabinet Dan Argumentasi Araujo

Menteri Luar Negeri Brasil, Ernesto Araujo membantah bahwa negaranya telah melakukan deforestasi terhadap hutan hujan Amazon, ia juga mengatakan bahwa peringatan yang tidak berdasar atas perubahan iklim global telah mengancam kedaulatan Brasil (Doering et al, 2018). Lonjakan kebakaran hutan yang beberapa kali terjadi di Amazon, yang telah dianggap sebagai benteng melawan perubahan iklim, menyebabkan kecaman dan kritik internasional terhadap Presiden Brasil Jair Bolsonaro karena memprioritaskan pembangunan kawasan daripada perlindungan hutan.

Araujo yang berpendapat bahwa ada kekurangan bukti ilmiah mengenai penyebab pemanasan global mengatakan jika para pendukung perubahan iklim membangkitkan suatu peringatan terkait perlindungan hutan amazon hanya semata-mata untuk tujuan politik sebagai bagian dari konspirasi sayap kiri melawan Amerika Serikat dan Brasil, yang kedaulatannya sedang diserang (Doering et al, 2018). Araujo mengatakan bahwa kebakaran Amazon rata-rata tahun ini dan deforestasi di Brasil hanya bertanggung jawab atas 2% emisi CO₂ global. Secara global, tambahnya, deforestasi bertanggung jawab atas 11% dari total emisi CO₂ (Doering et al, 2018).

Bolsonaro pada saat yang bersamaan juga telah memilih seorang menteri luar negeri baru yang memiliki kepercayaan bahwa perubahan iklim adalah bagian dari plot oleh "*Marxis Culture*" untuk melumpuhkan ekonomi barat dan mendorong pertumbuhan China. Ia mengklaim bahwa dalih lingkungan hidup hanya dijadikan alat dominasi global untuk melucuti pengaruh Barat (Doering et al, 2018). Kepercayaan ini telah digunakan untuk menjustifikasi peningkatan kekuatan pengaturan negara atas ekonomi dan kekuatan institusi internasional, serta untuk menghambat pertumbuhan ekonomi di negara-negara kapitalis demokratis serta untuk mempromosikan pertumbuhan Cina.

Menilik dari perubahan Undang-Undang, Argumentasi Kabinet serta Arah Kebijakan baru yang diciptakan oleh kabinet Bolsonaro, telah dengan jelas menggambarkan suatu perubahan kebijakan yang diakibatkan oleh *Bureaucratic Advocacy*, dimana perubahan bisa saja terjadi dari sekelompok orang di dalam pemerintahan yang mengarahkan kebijakan luar negeri. Kelompok ini bisa saja berada di dalam sebuah lembaga atau menyebar di sejumlah institusi namun mereka berinteraksi secara berkala (Hermann, 1990).

KESIMPULAN

"*Image*" serta orientasi Brasil sebagai negara pelopor kebijakan dan diplomasi lingkungan yang dipupuk semenjak tahun 1992 di masa pemerintahan Collor de Mello secara berangsur-angsur tengah mengalami perubahan dalam masa periode tiga pemerintahan presidensial sejak tahun 2003 hingga 2014. Perubahan ini kemudian mencapai puncaknya di masa sekarang pada masa pemerintahan Presiden Jair Bolsonaro. Kebijakan yang inovatif dan mampu untuk mengendalikan deforestasi kian hari kian melemah. Keputusan-keputusan pemerintah untuk mengarahkan kembali

pemerintahannya agar dapat mendukung proyek-proyek infrastruktur dan energi membawa banyak perubahan negatif terhadap sebagian besar wilayah Hutan Amazon.

Semakin melemahnya hubungan antara Menteri Lingkungan Hidup dengan para aktivis lingkungan secara berturut-turut selama tiga masa pemerintahan, peraturan Perundang-Undangan yang terus-menerus direvisi untuk mengurangi kemampuan Kementerian Lingkungan Hidup, aktivis lingkungan, dan Menteri Público untuk memfasilitasi berjalannya manajemen dan kelestarian hutan, pada akhirnya turut mendukung pelemahan kapasitas Brasil dalam menjaga kelestarian hutan hujan amazon. Deforestasi yang terjadi di Brazil pun turut serta meningkat dari tahun ke tahun semenjak masa pemerintahan Bolsonaro. Beberapa kebijakan domestik, anggaran serta konstitusi mengenai lingkungan di Brasil telah diubah oleh Bolsonaro beserta kabinetnya. Hal ini menjadikan Bolsonaro menjadi momok yang kemudian dianggap malapetaka dalam lingkungan oleh dunia.

Bolsonaro dengan segala Kebijakan anti-lingkungannya dan ketidakpeduliannya akan dampak dari suatu kebijakan atau tindakan yang ia agendakan bersama kabinetnya terhadap masyarakatnya telah menjadikan ia bukan hanya sebagai pemimpin yang *oportunis*, namun juga *unethical*. Kebijakan-kebijakan politiknya telah membuktikan bahwa mayoritas dari perubahan kebijakan lingkungan di Brazil diakibatkan oleh faktor *Leader Driven* dari Bolsonaro itu sendiri. Dimana dalam kondisi ini biasanya pemimpin pemerintahannya sering memaksakan kehendaknya dalam arah dasar kebijakan luar negeri (Hermann, 1990). Selain itu, menilik dari perubahan Undang-Undang, argumentasi kabinet serta arah kebijakan baru yang diciptakan oleh kabinet Bolsonaro, telah dengan jelas menggambarkan suatu perubahan kebijakan yang diakibatkan oleh *Bureaucratic Advocacy*, dimana perubahan bisa saja terjadi dari sekelompok orang di dalam pemerintahan yang mengarahkan kebijakan luar negeri. Kelompok ini bisa saja berada di dalam sebuah lembaga atau menyebar di sejumlah institusi namun mereka berinteraksi secara berkala (Hermann, 1990).

Kasus perubahan orientasi kebijakan yang dialami oleh Brasil merupakan salah satu dari sekian banyak kasus-kasus lain dalam hubungan internasional dimana faktor terbesar yang menyebabkannya adalah keputusan pemimpin negara dan/ kabinet negara itu sendiri. Fenomena ini dapat mengimplikasikan bahwa di beberapa negara di dunia, kepemimpinan suatu negara, meskipun bentuk pemerintahan yang berjalan adalah Republik, sifat-sifat serta nilai-nilai otoritarian tetap melekat pada seorang pemimpin atau sekelompok orang yang memiliki "*power*" dibandingkan masyarakat umum. Hal ini sejalan dengan konsep "*power*" itu sendiri dalam ilmu politik dimana menurut Morgenthau, *power* merupakan kemampuan manusia untuk mengontrol dan mempengaruhi pikiran dan tindakan manusia yang lain, penjelasan ini juga sejalan dengan pemikiran Richard Mansbach bahwa *Power* adalah hubungan psikologi antara satu aktor dengan aktor yang lainnya dan kemudian mempengaruhi pola tindakannya (Mansbach, 2011). Fenomena ini secara langsung memberikan bukti dan gambaran pada masyarakat internasional bahwa dengan *power* yang dimiliki, seorang pemimpin negara dapat memanfaatkan suatu kebijakan yang dibuatnya hanya untuk kepentingan pribadi maupun kelompok saja. Hal ini juga sejalan dengan deskripsi pada Teori Hermann yang menjelaskan bahwa terdapat beberapa faktor internal yang mendukung terjadinya suatu kebijakan luar negeri negara, dua diantaranya adalah *Leader Driven* dan *Bureaucratic Advocacy*.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Mohamad Rosyidin, S.Sos., M.A. selaku dosen pembimbing 1, Bapak Muhammad Faizal Alfian, S.I.P., M.A. selaku dosen pembimbing 2 dan Bapak Muhammad Faiq Adi Pratomo, S.I.P., M.Sc. selaku dosen penguji yang telah membimbing Penulis sehingga jurnal penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik.

REFERENSI

- Abers, R. N. (2015). Nomeações Políticas no Ministério do Meio Ambiente (2003-2013): Interconexões Entre ONGs, Partidos e Governos. *Opinião Pública* 21(2), 1-29.
- Amorim Neto, O. (2002). Presidential cabinets, electoral cycles, and coalition discipline in Brazil. In S. M. Nacif, *Legislative Politics in Latin America* (pp. 48-78). Cambridge, UK: Cambridge University Press.
- Antuniassi, M. H. (1989). *O Movimento Ambientalista em São Paulo: Análise Sociológica de um Movimento Social Urbano*. São Paulo: Universidade de São Paulo, Centro de Estudos Rurais e Urbanos, Textos CERU 2.
- Araujo, Suely Mara V. G. and Feldmann, Fabio J. (2020, January 1). Política ambiental, o que o orçamento mostra e promete.
- Arima, E. P.-F. (2014). Public Policies can Reduce Tropical Deforestation: Lessons and Challenges from Brazil. *Land Use Policy* 41, 465-473.
- Bennet. A, G. A. (2005). *Case Studies and Theory Development in the Social Sciences*. Belfer Center Studies in International Security.
- Biller, D. (2022). Brazil's Bolsonaro Issues Decrees to Boost Mining of Amazon. *ABC News*.
- Britannica. (2022). United Nations. *Encyclopedia Britannica*.
- Dowler, C. (2021, November 18). *Revealed: Europe and UK's Vast Shipments of Banned , Bee-Killing 'neonics'*. Uearthed. Retrieved from <https://unearthed.greenpeace.org/2021/11/18/revealed-europe-and-the-uks-vast-shipments-of-banned-bee-killing-neonics/>
- Duit, A. (2016). The Four Faces of the Environmental State: Environmental Governance Regimes in 28 Countries. *Environmental Politics* 25(1), 69-91.
- DW. (2021, 5 15). Longgarkan Regulasi, Brasil Percepat Komersialisasi Amazon. *DW*. Retrieved from DW.
- Endarwati, T. (2018). Faktor Yang Melatarbelakangi Brazil Meratifikasi Paris Agreement Sebagai Hasil dari Negosiasi United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) di Paris Tahun 2015. *UIN Syarif Hidayatullah*.
- Escobar, H. (2019, January 22). Brazil's New President Has Scientists Worried.
- Escobar, H. (2019, January 29). Brazil's New President has Scientists Worried. Here's Why. Retrieved from Science.org: <https://www.science.org/content/article/brazil-s-new-president-has-scientists-worried-here-s-why>
- Fahey, B. K. (2016). Governing Complexity: Recent Developments in Environmental Politics and Policy. *Policy Studies Journal* 44 (S1), 28-29.
- Fearnside, P. (2019). Commentary: Will President Bolsonaro withdraw Brazil from the Paris Agreement.
- Feeney, P. (1992). Environmental Reform in Brazil: Advances and Reversals. *Development in Practice* 2(1), 3-11.
- Feeney, P. (2014). Environmental reform in Brazil: advances and reversal. *Development in Practice*, 3-11.

- Global Witness. (2021, Sept 13). *Global Witness reports 227 land and environmental activists murdered in a single year, the worst figure on record*. Retrieved from <https://www.globalwitness.org/en/press-releases/global-witness-reports-227-land-and-environmental-activists-murdered-single-year-worst-figure-record/>
- Goldmann, K. (1988). *Change and Stability in Foreign Policy: The Problems and Possibilities of Detente*. New Jersey: Princeton University Press.
- Gonzaga, G. (2022). Bolsonaro is a catastrophe for the environment. *Greenpeace*.
- Green Growth Knowledge Platform. (2022, April 17). *Brazil - Nationally Determined Contribution (NDC)*. Retrieved from Green Growth Knowledge Platform: [ri https://www.greengrowthknowledge.org/national-documents/brazil-nationally-determined-contribution-ndc](https://www.greengrowthknowledge.org/national-documents/brazil-nationally-determined-contribution-ndc)
- Gustavsson, J. (1999). *How Should We Study Foreign Policy Change? Vol. 34 (1)*, 73-75. London: Sage Publications.
- Haas, P. M. (1990). *Saving the Mediterranean: The Politics of International Environmental Cooperation*. New York: Columbia University Press.
- Haggard, S. a. (2001). *Presidents, Parliaments and Policy*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Hermann, C. F. (1990). *Changing Course: When Governments Choose to Redirect Foreign Policy*. Blackwell Publishing Ltd.
- Hermann, C. F. (1990). *Changing Course: When Governments Choose to Redirect Foreign Policy*. Blackwell Publishing Ltd.
- Hochstetler, K. (2011). The Politics of Environmental Licensing: Energy Projects of the Past and Future in Brazil. *Studies in Comparative International Development* 46(4), 349-371.
- Hochstetler, K. a. (2007). *Greening Brazil: Environmental Activism in State and Society*. Durham: Duke University Press.
- Hochstetler, K. a. (2012). Brazil and the Politics of Climate Change: Beyond the Global Commons. *Environmental Politics* 21(5), 753-771.
- Hochstetler, K. a. (2013). The Renewed Developmental State: The National Development Bank and the Brazil Model. *Journal of Development Studies* 49 (11), 1484-1499.
- Human Rights Watch. (2018). “*COP26: Don’t Be Fooled by Bolsonaro’s Pledges*”. Retrieved from <https://www.hrw.org/news/2021/11/02/cop26-dont-be-fooled-bolsonaros-pledges>
- Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. (2020).
- Landim, S. N. (2012). The Contents and Scope of Environmental Impact Statements: How Do They Evolve Over Time? *Impact Assessment and Project Appraisal* 30, 217-228.
- Linz, J. (1990). The perils of presidentialism. *Journal of democracy* 1(1), 51-69.
- Lovins, A et al. (2007). A Road Map for Natural Capitalism. Harvard Business Review. Retrieved December 8, 2022, from <https://hbr.org/2007/07/a-road-map-for-natural-capitalism>.
- Maciel, E. (2022, March 18). *Brazil sets record for pesticide approval and seeks even more flexibility*. Development Aid. Retrieved from <https://www.developmentaid.org/news-stream/post/139616/brazil-sets-record-for-pesticide-approval>.
- Mainwaring, S. (1993). Presidentialism, Multipartism, and Democracy The Difficult Combination. *Comparative Political Studies* 26(2), 198-228.

- Midlarsky, M. I. (1998). Democracy and the Environment: An Empirical Assessment. *Journal of Peace Research* 35(3), 341-361.
- Minc, C. (1985). *Como Fazer Movimento Ecológico e Defender a Natureza e as Liberdades*. Petrópolis: Editora Vozes/IBASE.
- Ministry of Science, T. a. (2016).
- Morgan, R. (2012). Environmental Impact Assessment: The State of the Art. *Impact Assessment and Project Appraisal* 30, 5-14.
- Mueller, B. (2010). The Fiscal Imperative and the Role of Public Prosecutors in Brazillian Environmental Policy. *Law and Policy* 32(1), 104-126.
- Musthafa, S. A. (2022, Mei 9). *Hutan Amazon Gundul Dua Kali Lipat dalam Setahun, Tak Masuk Akal*. Retrieved from Pikiran Rakyat.
- Nunes, J. a. (2015). Profile: Marina Silva and the Rise of Profile: Marina Silva and the Rise of. *Environmental Politics* 24(3), 506-511.
- Nunes, J. a. (2015). Profile: Marina Silva and the Rise of Sustainability in Brazil. *Environmental Politics* 24(3), 506-511.
- Pestizidatlas. (2022).
- Raile, E. D. (2011). The Executive Toolbox: Building Legislative Support in a Multiparty Presidential Regime. *Political Research Quarterly* 64(2), 323-334.
- Rosenau, J. N. (1969). *International Politics and Foreign Policy*. New York: Macmillan USA
- Satria, L. (2019). *Deforestasi Tingkatkan Emisi Karbon Brasil Tahun 2019 | Republika Online*. Retrieved from Republika Online: <https://www.republika.co.id/berita/qjfgyr459/deforestasi-tingkatkan-emisi-karbon-brasil-tahun-2019>
- SBS News. (2020). *Brazil's Jair Bolsonaro calls environmental NGOs a 'cancer' amid pressure to better protect the Amazon*. Retrieved from <https://www.sbs.com.au/news/article/brazils-jair-bolsonaro-calls-environmental-ngos-a-cancer-amid-pressure-to-better-protect-the-amazon/nmklvg9g5>
- Serhan, Y. (2021). The Real Reasons Behind Bolsonaro's Climate Promises. *The Atlantic*.
- The Conversation. (2018). Jair Bolsonaro: How business elites helped him to power in Brazil - and why they might regret it. *The Conversation*.
- The Guardian. (2018). Brazil's new foreign minister believes climate change is a Marxist plot.
- United Nations. (1992). *United Nations - Conferences of Environment and Sustainable Development - Rio 1992*. Retrieved from un.org: <https://www.un.org/en/conferences/environment/rio1992>
- World Bank. (2008). *Environmental Licensing for Hydroelectric Projects in Brazil: A Contribution to the Debate, Volume 1 (of 3 Volumes): Summary Report*. Washington, DC: World Bank, Brazil Country Management Unit, Report No. 40995-BR.

GLOSARIUM

- AMDAL : Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
- ANVISA : Agência Nacional de Vigilância Sanitária
- BNDES : Brasil Development Bank
- CONAMA : Conama Conselho Nacional do Meio Ambiente/Dewan Nasional Lingkungan Brazil
- EIA : Environmental Impact Assesment

FAO : Organisasi Pangan dan Pertanian atau Food And Agricultural Organisation
 FUNAI : Fundacdo Nacional do Indio
 HHPs : Highly Hazardous Pesticides
 IBAMA : Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renovaveis)
 IMF : International Monetary Fund
 INPE : Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais
 KTT : Konferensi Tingkat Tinggi
 LSM : Lembaga Swadaya Masyarakat
 LULUCF : Land Use, Land-Use Change and Forestry
 NDC : Nationally Determined Contribution
 OECD : Organisation for Economic Co-operation and Development
 OMS : Organisasi Masyarakat Sipil
 PAC : Programa de Aceleração do Crescimento/Program untuk Percepatan Pertumbuhan
 PPCDAM : The Action Plan for the Prevention and Control of Deforestation in the Legal Amazon
 PT : Partido dos Trabalhadores/Workers Party
 UE : Uni Eropa
 UNCED : United Nations Conference of Environment and Development
 UNFCCC : United Nations Climate Change Conference
 WHO : World Health Organization